

MIGRASI ORANG-ORANG YOGYAKARTA KE PASURUAN 1900-1930

Oleh: Refi Refiyanto dan Mudji Hartono, M. Hum.
NIM. 11407141019 dan NIP. 19550115 198403 1 001

Abstrak

Sejak memasuki abad XX campur tangan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap kehidupan penduduk pribumi semakin kuat. Perkembangan agroindustri dan monetisasi menyebabkan penduduk semakin menjauhi batas kesejahteraan. Hal ini menyebabkan penduduk pribumi di Karesidenan Yogyakarta banyak melakukan *out*-migrasi menuju berbagai daerah di antaranya ke Karesidenan Pasuruan. Karesidenan Yogyakarta merupakan wilayah otoritas tidak langsung Pemerintah Kolonial Belanda sehingga kondisi birokrasi tradisionalnya masih kuat. Berbeda dengan Karesidenan Pasuruan yang sejak awal merupakan wilayah otoritas langsung Pemerintah Kolonial Belanda. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor penyebab, proses serta dampak migrasi masyarakat pribumi di Karesidenan Yogyakarta menuju Karesidenan Pasuruan pada kurun waktu 1900 hingga 1930.

Proses penelitian ini menerapkan metode sejarah kritis, dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, tahap heuristik dengan melakukan pencarian, menemukan dan menghimpun jejak-jejak peristiwa masa lampau terhadap sumber-sumber sejarah. Kedua, tahap kritik sumber merupakan tahapan untuk memperoleh keotentikan dan kredibilitas dari sumber-sumber sejarah yang telah dihimpun. Ketiga, tahap interpretasi dengan mencari pengertian dan keterkaitan dari berbagai fakta-fakta yang mendukung terjadinya suatu peristiwa sejarah. Keempat, tahap historiografi sebagai upaya melakukan pemaparan hasil penelitian yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya eksploitasi di Karesidenan Yogyakarta menyebabkan penduduk pribumi kalangan bawah merasa tertekan. Menyempitnya areal tanaman pangan akibat desakan agroindustri dan penambahan penduduk menyebabkan sumber penghidupan penduduk berkurang. Seiring dengan perkembangan ekonomi uang, kasus migrasi dari Karesidenan Yogyakarta menuju karesidenan lain disebabkan oleh faktor ekonomi. Di Karesidenan Pasuruan terdapat kondisi eksploitasi yang relatif kecil dengan banyak tersedia lapangan pekerjaan dan lahan tanaman pangan. Melalui pengaruh kerabat di daerah tujuan, proses migrasi tersebut terjadi secara berantai dan terkonsentrasi. Adapun konsentrasi tujuan migrasi di Karesidenan Pasuruan berada di Kabupaten Malang dan Lumajang. Dampak migrasi di daerah tujuan pada akhirnya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk, bertambahnya tingkat kepadatan penduduk, perubahan wilayah administrasi, perkembangan wilayah, diferensiasi sosial dan mobilitas sosial.

Kata Kunci: *Migrasi, Yogyakarta, Pasuruan.*

THE MIGRATION OF YOGYAKARTANS TO PASURUAN IN 1900-1930

By:

Refi Refiyanto and Mudji Hartono, M. Hum.

NIM. 11407141019 and NIP. 19550115 198403 1 001

Abstract

Since entering 20th century, the intervention of Dutch colonial government to native's life began much stronger. The development of agroindustry and monetization had caused the native far from welfare. This, consequently, made the native in Yogyakarta Residency migrate to many places, which one of them is Pasuruan Residency. Yogyakarta Residency was the Dutch government's indirect authority territory which made the condition of traditional bureaucracy still strong. Unlike Yogyakarta Residency, Pasuruan Residency was the Dutch government's direct authority territory from the beginning. Thus, the aims of this writing are to know about the causative factor, the process, and also the impact of native's migration in Yogyakarta Residency to Pasuruan Residency within the period of 1900 until 1930.

The process of this research applies historical-critical method using steps below. Firstly, heuristic is searching, finding, and collecting past events towards historical sources. Secondly, source criticism are a step to obtain authenticity and credibility of the collected historical sources. Thirdly, interpretation seeks an understanding and an association from facts which support a historical event to happen. The last one is historiography which explains the result of the research.

The research shows that the exploitation in Yogyakarta Residency had made the lower-class native feel suppressed. The decrease of crop fields caused by agro industry and population growth had also made the native lost their livelihoods. Along with economic development, the migration of Yogyakarta Residency to another residency was caused by economic factor. In Pasuruan Residency had relatively small exploitative condition because of the availability of employment and crop fields. The relative's influence in the destination area, the process became a chain and concentrated migration. The concentration of migration destination spot in Pasuruan Residency was located in the district of Malang and Lumajang. At last, the impact of migration in the destination area had caused the population growth, the increase of population density, the change of administrative area, the area development, the social differentiation, and the social mobility.

Keywords: *Migration, Yogyakarta, Pasuruan.*

A. Pendahuluan

Penjajahan yang dapat artikan sebagai proses monopoli perdagangan atau kolonialisasi kuno di Indonesia telah berakhir sejak dibubarkannya *Verenigde Oost Indische Compagne* (VOC) pada tahun 1799. Sebagai estafet, Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian mengambil alih kekuasaan pasca VOC. Sejak masa itu Indonesia dianggap menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Belanda dan telah memasuki masa imperialisasi.¹

Memasuki masa imperialisasi, Pemerintah Kolonial Belanda mengganti cara eksploitasi lama menjadi eksploitasi baru, dengan sistem dan teknologi modern yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Cara eksploitasi yang terakhir ini dipusatkan pada pemanfaatan faktor produksi yang kaya di Indonesia seperti lahan dan tenaga kerja. Melalui faktor produksi yang kaya tersebut maka pemerintah kolonial mulai mengganti tanaman tradisional dengan memperkenalkan tanaman niaga yang laku di pasaran dunia. Proses transformasi tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak terhadap gejala sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk terjadinya kasus migrasi di kalangan penduduk pribumi.

Sejak tahun 1830 atau memasuki masa Tanam Paksa, pemerintah kolonial mempraktekkan cara eksploitasi tanaman niaga dengan melibatkan kehidupan pedesaan secara mendalam. Corak masyarakat pribumi didasarkan pada ekonomi desa yang semata-mata menekankan pada pertukaran produksi pertanian dengan kebutuhan-kebutuhan subsisten, menyebabkan mayoritasnya terdiri dari para petani. Basis petani terdapat di pedesaan, di mana masih tersediannya lahan pertanian yang luas.² Dengan demikian telah memenuhi ketentuan lahan dan tenaga kerja sebagaimana syarat utama proyek dalam Tanam Paksa maupun masa-masa berikutnya.

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Jilid 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. xx.

² Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang, 1830-1900*, (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1989), hlm. 149.

Sejak paruh kedua abad XIX pengaruh liberal mulai meluas sebagai tanggapan terhadap rusaknya masyarakat Jawa yang diakibatkan oleh sistem Tanam Paksa.³ Puncak pengaruh liberal terjadi sejak ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria 1870 yang berujung pada diterapkannya Politik Pintu Terbuka bagi modal asing. Modal-modal tersebut diinvestasikan pada agroindustri maupun pertambangan, dengan syarat memperoleh izin dari Pemerintah Kolonial Belanda. Sejak saat itu Indonesia telah memasuki masa Politik Ekonomi Liberal.

Asas liberal menghendaki terjadinya individualisasi dengan diterapkannya kerja bebas bersistem kontrak. Hal ini menyebabkan para pekerja yang bekerja di perusahaan agroindustri mulai mendapatkan upah. Penetapan upah ini pada akhirnya menimbulkan terjadinya monetisasi. Akibatnya telah terjadi perubahan dari corak masyarakat ekonomi subsisten menjadi masyarakat ekonomi uang.

Perubahan tersebut kemudian digunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda beserta aparaturnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Melalui birokrasi yang modern pemerintah kolonial melakukan manipulasi perputaran uang dengan menetapkan upah rendah dan mengedarkan barang-barang impor. Dengan demikian penduduk pribumi secara berangsur-angsur semakin menjauhi batas kemakmuran.

Sejak Politik Etis diberlakukan tahun 1900 maka pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda semakin intensif terhadap kehidupan penduduk pribumi. Selaras dengan itu, eksploitasi agroindustri dan monetisasi semakin berkembang. Hal ini menyebabkan kondisi kesejahteraan penduduk pribumi semakin menurun dan mulai mencari penghidupan yang lebih baik dengan melakukan migrasi ke daerah lain.

B. Migrasi: Daya Dorong di Yogyakarta dan Daya Tarik di Pasuruan

Mengenai faktor pertama terjadinya migrasi yaitu tentang tingkat kepadatan penduduk, di mana angka di Karesidenan Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan Karesidenan Pasuruan. Pada tahun 1900, 1905 dan 1920 tingkat kepadatan penduduk di Yogyakarta sebesar 342, 353 dan 407,79

³ D. H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I*, terj. Prajudi Atmosudirdjo, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1962), hlm. 235-236.

jiwa/km².⁴ Kemudian tahun 1930 meningkat menjadi 491,99 jiwa/km². Hal tersebut berbeda dengan tingkat kepadatan penduduk di Pasuruan yang dapat dikatakan lebih rendah. Pada tahun 1900, 1905 dan 1920 tingkat kepadatan penduduk di Pasuruan sebesar 206, 228 dan 255,20 jiwa/km². Kemudian tahun 1930 tingkat kepadatan penduduk meningkat menjadi 310,12 jiwa/km².⁵

Faktor kedua, mengenai rasio sawah dan lahan penduduk pribumi di Yogyakarta cukup tinggi yaitu mencapai 2.351,10 jiwa/km² dan 614,95 jiwa/km². Berbeda dengan tingkat rasio sawah dan lahan penduduk pribumi di Pasuruan yang hanya sebesar 1.768,88 dan 467,41 jiwa/km². Dengan demikian pembagian sawah dan lahan penduduk pribumi di Yogyakarta dapat dikatakan lebih kecil jika dibandingkan dengan Pasuruan.

Melihat kecilnya pembagian sawah dan lahan penduduk pribumi di Yogyakarta menyebabkan pembagian beras tiap kepala juga kecil. Adapun pembagian beras di Yogyakarta tahun 1920 sebesar 55,58 kg/kepala dalam setahun atau 0,15 kg/kepala tiap hari. Di Pasuruan pembagiannya lebih tinggi, yaitu sebesar 77,81 kg/kepala dalam setahun atau 0,21 kg/kepala tiap hari. Mengenai rata-rata standar konsumsi beras tiap kepala sebesar 0,75 *kati* atau setara dengan 0,45 kg.⁶

Selain itu diungkapkan bahwa Pasuruan dapat dikatakan berada di atas rata-rata konsumsi penduduk Jawa dan Madura, di mana jagung dan bahan pangan

⁴ *Indisch Verslag 1931, Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indie Over Het Jaar 1930*, (Batavia: Departement van landbouw, Nijverheid en Handel, 1931), hlm. 15, *Kolonial Verslag 1923, Bijlage A*, hlm. 5 dan *Volkstelling 1930 Deel II, Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de Vorstlanden*, (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934), hlm. 136-138 dan 169-170.

⁵ *Volkstelling 1930 Deel III, Inheemsche Bevolking van Oost-Java*, (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934), hlm. 140-141.

⁶ Manggistan, "Produksi Padi di Jawa yang Tidak Mencukupi", dalam Sajogyo dan W. L. Collier, peny., *Budidaya Padi di Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 100-101.

hewani dikonsumsi dalam jumlah besar.⁷ Berbeda dengan di Yogyakarta disebutkan bahwa kekurangan beras menyebabkan tanaman non-padi menjadi penting untuk dikonsumsi maupun dijual. Tanaman lain yang digunakan sebagai bahan pangan seperti kelapa, pinang, bambu dan kayu-kayuan ditanam oleh para *demang, bekel* beserta rakyatnya atas anjuran Patih Danureja.⁸

Faktor selanjutnya, mengenai jumlah populasi ternak di Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan Yogyakarta. Disebutkan bahwa kedua jenis hewan ini selain digunakan untuk membajak sawah juga sebagai tenaga angkut di perusahaan agroindustri. Selain itu ternak juga dapat dikonsumsi sebagai bahan pangan atau diperdagangkan.

Mengenai rata-rata konsumsi garam di Yogyakarta pada tahun 1920 sebesar 4,19 kg/kepala, sementara di Pasuruan sebesar 2,96 kg/kepala. Dengan demikian, kedua daerah ini belum mencapai standar minimal konsumsi garam yang besarnya 5,25 kg/kepala atau sekitar 14 pon/kepala.⁹ Mengenai lebih tingginya konsumsi garam di Yogyakarta diduga untuk menutupi kekurangan bahan pangan. Hal ini merujuk pada pernyataan penduduk di Yogyakarta yang menganggap asal ada garam maka bisa makan.¹⁰

Di Yogyakarta dampak wabah penyakit influenza merupakan terparah di Jawa dan Madura, yaitu mencapai 38.533 jiwa pada kuartal pertama dan kedua tahun 1919. Di Pasuruan pada kurun waktu 1917-1918 jumlah korban influenza tidak lebih dari 3.000 jiwa. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga beras, kegagalan panen akibat musim hujan yang datang terlambat dan curah hujan yang

⁷ Pieter Creutzberg dan J. T. M. van Laanen, peny., *Sejarah Statistik Indonesia*, terj. Kustiniyati Mochtar, dkk., (Jakarta: Obor, 1987), hlm. 63.

⁸ Anton Haryono, "Industri Pribumi Daerah Yogyakarta Masa Kolonial, 1830-an-1930-an", *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 53.

⁹ Mudji Hartono, "Pertanian Tanaman Pangan di Karesidenan Rembang, 1900-1928", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), hlm. 182-183.

¹⁰ Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan, Studi Historis 1850-1942 di Jawa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 58.

sedikit serta kekurangan bahan pangan. Selain itu di Yogyakarta disebutkan antara 1918-1919 terjadi wabah kolera, di mana jumlah penderita pada tahun 1918 merupakan tertinggi di Jawa dan Madura. Begitu juga dengan kasus pes marak terjadi, di mana disebabkan oleh kepadatan yang tinggi dan lingkungan yang buruk. Buruknya lingkungan tersebut disebabkan para ibu rumah tangga tidak sempat membersihkan tempat tinggalnya karena turut bekerja mencari uang.

Mengenai kondisi birokrasi di Yogyakarta memiliki tingkatan yang panjang dan ketat. Hal ini menyebabkan jumlah pajak dan kerja wajib yang ditetapkan lebih besar dari pada di Pasuruan. Di Yogyakarta, bagi setiap penduduk pemilik lahan yang tidak sanggup membayar pajak dan melaksanakan kerja wajib serta melakukan pemindahan hak lahan kepada orang lain akan dicabut haknya atau bahkan diusir dari desa tempat tinggalnya. Selain itu di Yogyakarta marak terjadi persewaan bebas yang disertai tekanan kepala desa. Kemudian bagi setiap penduduk yang menanam tembakau dikenakan pajak cukup tinggi, yaitu sebesar f 1,50-4,50/bau. Selanjutnya penduduk juga dikenakan pajak sebesar f 1/bulan sebagai biaya hutang perbaikan rumah dalam program pemerintah untuk menanggulangi penyakit pes.¹¹

Kekurangan uang menyebabkan penduduk mulai mencari uang di sektor agraris, terutama pada agroindustri gula. Pada tahun 1928 tercatat sebanyak 123 perusahaan agroindustri berada di Pasuruan, sedangkan di Yogyakarta hanya ada 22 perusahaan.¹² Selanjutnya mengenai perbandingan tingkat upah di Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan tingkat upah di Pasuruan. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang menjadikan Pasuruan sebagai daerah tujuan bagi para pencari pekerjaan.

Mengenai jumlah *out*-migrasi (migrasi keluar) di Yogyakarta sebesar 160.616 orang, sedangkan jumlah *in*-migrasi (migrasi masuk) sebesar 38.775 orang. Hal ini menyebabkan Yogyakarta dapat dikatakan sebagai daerah migrasi keluar. Berbeda dengan Pasuruan, di mana jumlah *in*-migrasi sebesar 216.249

¹¹ Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 68.

¹² KV 1929, *Bijlage W*, hlm. 2-3.

orang, sedangkan jumlah *out*-migrasi sebesar 151.054 orang.¹³ Hal ini menyebabkan Pasuruan dapat dikatakan sebagai daerah migrasi masuk.

C. Proses Migrasi

Penduduk Yogyakarta dalam melakukan *out*-migrasi menggunakan jenis transportasi berupa kereta api. Kelancaran migrasi penduduk pribumi diharapkan oleh perusahaan agroindustri sebagai alokasi tenaga kerja murah. Hal ini diupayakan tidak akan merugikan pihak perusahaan agroindustri, sehingga para migran yang akan tinggal di daerah tujuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu pendatang harus memiliki hubungan keluarga dengan penduduk asli dan kepala desa harus bisa menjamin bahwa pendatang merupakan orang yang memiliki kepribadian baik.¹⁴

Para migran merupakan bukan kalangan terbaik dalam struktur sosial masyarakat. Kegiatan migrasi ini lebih banyak dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sempit dan petani tanpa lahan, terutama dengan tempat tinggal yang padat. Para migran memiliki kecenderungan melakukan migrasi berkelompok dari daerah asal menuju daerah tujuan yang sama. Para migran cenderung mengikuti kerabat yang sudah bermigrasi dan seringkali kerabat tersebut kembali ketempat asalnya, sehingga terjadi migrasi berantai. Penentuan kerabat, kenalan dan orang-orang dari distrik yang sama tentu akan memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan selain dapat diketahui latar belakang calon pekerja juga dapat memberikan kontrol sosial.¹⁵

Mengenai jalur yang digunakan para migran asal Yogyakarta menuju Pasuruan terlebih dahulu melewati Karesidenan Kediri. Mereka datang ke Kediri dan menjadikannya sebagai tempat tinggal sementara. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur, yaitu Karesidenan Pasuruan dan Besuki. Mengenai penyebab Kediri dijadikan sebagai tempat tinggal sementara

¹³ *Volkstelling 1930 Deel VIII, Overzicht voor Nederlands-Indie*, (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1936), hlm. 94-95.

¹⁴ Bambang Sulistyono, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁵ Hans Gooszen, *A Demographic History of The Indonesian Archipelago, 1880-1942*, (Leiden: KITLV Press, 1999), hlm. 61.

dikarenakan para migran ingin mencari daerah yang banyak tersedia pekerjaan agroindustri dengan tingkat kepadatan yang rendah, di mana masih tersedia lahan pertanian yang luas.

Mengenai jumlah migran dari Yogyakarta di Pasuruan dapat dilihat tabel berikut.

Jumlah Migran Asal Yogyakarta di Pasuruan Tahun 1930

Karesidenan	Jumlah	Kabupaten	Jumlah	Distrik	Jumlah
Pasuruan	15.796	Malang	14.419 (7.527 pria dan 6.892)	Pagak	8.541 (4.353 pria dan 4.188 wanita)
				Turen	2.859 (1.543 pria dan 1.316)
				Kepanjen	±1000
				Bululawang	lebih dari 800
				Distrik lainnya	±1.219
		Lumajang	1.027 (554 pria dan 473 wanita)	Tempeh	303 (168 pria dan 135 wanita)
				Lumajang	149 (75 pria dan 74 wanita)
				Kandangan	19 (9 pria dan 10 wanita)
				Ranulamongan	556 (302 pria dan 254 wanita)

Sumber: *Volkstelling 1930 Deel VIII*, hlm. 94; *Volkstelling 1930 Deel III*, hlm. 28 dan 36.

Dari 15.796 orang migran asal Yogyakarta sebanyak 8.106 orang (4.174 pria dan 3.932 wanita) berasal dari Kulon Progo. Dari angka tersebut sekitar 6.825 orang terkonsentrasi di Distrik Pagak sebesar ±5.525 orang (± 2.778 pria dan 2.747 wanita) dan Turen berjumlah lebih dari 1.300 orang, sementara sisanya sekitar 1.281 orang tersebar di lain distrik.¹⁶

Menurut legenda desa, kebanyakan para pendiri desa di Malang bagian selatan berasal dari Jawa Tengah atau beberapa daerah Jawa Timur yang terletak disebelah barat Malang. Kebanyakan dari mereka berkaitan erat dengan Untung Suropati dan Perang Diponegoro.¹⁷ Mengenai migran dari Kulon Progo tidak terlepas dari perkebunan kopi di Malang yang berkembang sejak Tanam Paksa. Mengenai letak perkebunan kopi di Yogyakarta berada di sebelah barat daya Gunung Merapi dan Kulon Progo, terutama di Distrik Nanggulan. Hal ini dapat diperkirakan bahwa pekerja pemetik kopi di Malang merupakan pekerja pemetik

¹⁶ *Volkstelling 1930 Deel III, op.cit.*, hlm. 36.

¹⁷ Hiroyoshi Kano, *Pagelaran, Anatomi Sosial Ekonomi Pelapisan Masyarakat Tani di Sebuah Desa Jawa Timur*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 11-12.

kopi dari Kulon Progo. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa migrasi yang dilakukan orang-orang Yogyakarta ke Malang dan Lumajang pada abad XX merupakan keturunan dari para migran masa Untung Suropati, Perang Diponegoro dan pekerja pemetik kopi.

Mengenai faktor daya tarik migrasi di Malang dan Lumajang diantaranya banyak terdapat perusahaan agroindustri dengan upah yang relatif tinggi. Selain itu kepemilikan lahan pribadi sangat dijunjung tinggi di Pasuruan. Hal ini terlihat dari banyak penduduk menanam tanaman niaga di lahannya sendiri. Hal ini disebabkan longgarnya ikatan birokrasi tradisional, sehingga penanaman dilakukan secara bebas. Kemudian di Lumajang masih banyak tersedianya lahan pertanian yang luas. Para migran di Lumajang banyak berasal dari *Vorstenlanden* dan Kediri, juga beberapa dari Bagelen, Tengger dan Madiun. Mereka kemudian mengolah lahan milik penduduk setempat dengan sistem bagi hasil.

Faktor lahan pertanian yang luas bagi para migran dianggap sangat penting seiring dengan terjadinya krisis ekonomi. Pada saat krisis upah berupa uang dihindari dan digantikan dengan barang. Hal ini menyebabkan penduduk kembali pada pola-pola subsisten dengan melakukan perluasan tanaman pangan, terutama pada jenis padi dan jagung.¹⁸

Mengenai keberadaan lahan pertanian yang luas juga banyak terdapat di Besuki. Disebutkan bahwa di Besuki paling banyak menawarkan pekerjaan agroindustri. Selain itu perusahaan juga menawarkan lahan pertanian pribadi yang berada di atau dekat pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan Besuki menjadi tujuan utama bagi para migran di Jawa dan Madura. Diketahui beberapa migran asal Yogyakarta di Pasuruan kemudian memutuskan untuk melanjutkan migrasi menuju Besuki.

D. Dampak Migrasi

Dampak terjadinya *in*-migrasi menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk di Malang dan Lumajang. Pertumbuhan penduduk ini kemudian menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan terjadinya perubahan wilayah administrasi, seperti pemisahan dan

¹⁸ Pieter Creutzberg dan J. T. M. van Laanen, peny., *op.cit.*, hlm. 78.

penggabungan desa, perkembangan jumlah *controleur*, pergantian nama distrik dan menurunnya jumlah subdistrik. Selain itu pertumbuhan penduduk juga menyebabkan terjadinya perkembangan wilayah. Kondisi ini terlebih terjadi di wilayah pedalaman dengan ditandai munculnya kota-kota baru dengan dibangunnya berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan pasar. Perkembangan wilayah di pedalaman ternyata selaras dengan pembukaan agroindustri, di mana membutuhkan banyak tenaga kerja.

Selain itu penambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman padi di Pasuruan. Ekstensifikasi penanaman padi ini terutama terjadi di wilayah yang masih tersedia lahan-lahan pertanian yang luas seperti di daerah Lumajang. Para pendatang, kemudian mulai mengolah lahan milik penduduk setempat dengan sistem bagi hasil, terutama pada tanaman padi, jagung dan tembakau. Adapun sistem bagi hasil di Lumajang dilakukan dengan cara *maro* dan *mertelu*. Di Malang sistem bagi hasil hanya dilakukan pada tanaman padi *gogo* dan palawija, di mana biasanya dilakukan di lahan pertanian yang luas.¹⁹

Para pendatang dari Yogyakarta semula tidak memiliki lahan di daerah tujuan. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya *kuli tlosor* di Malang dan Lumajang. *Kuli tlosor* ini pada perkembangannya mengalami mobilisasi sosial vertikal menjadi *kuli indhung* atau *kuli setengah kenceng* setelah mengolah lahan penduduk setempat melalui sistem bagi hasil. Munculnya *kuli indhung* dan *kuli setengah kenceng* menyebabkan para penduduk setempat yang memiliki lahan berubah menjadi *kuli kenceng* atau *sikep*.

Intensifikasi dan ekstensifikasi penanaman padi menyebabkan terjadinya evolusi pertanian. Pada tahun 1917 rata-rata konsumsi padi sebesar 2,46 pikul/kepala atau 1,23 pikul beras/kepala. Kemudian pada tahun 1920, diketahui rata-rata konsumsi padi meningkat menjadi 2,52 pikul/kepala atau 1,26 pikul beras/kepala. Dengan demikian pembagian padi tiap kepala di Pasuruan mengalami peningkatan.

¹⁹ A. M. P. A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, terj. Anonim, (Jakarta: Obor, 1985), hlm. 146 dan 149-150.

Dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja menyebabkan tingkat upah mengalami sedikit kenaikan. Hal ini kemudian tidak sebanding dengan naiknya tingkat inflasi pada saat depresi. Kondisi ini menyebabkan para pekerja menuntut perusahaan agroindustri untuk menaikkan tingkat upah dengan cara melakukan pemogokan. Selain itu kegoncangan ini menyebabkan pembakaran areal tebu meningkat.

Depresi ini kemudian berlanjut menjadi krisis yang menyebabkan ribuan pekerja kehilangan mata pencahariannya. Hal ini tentunya menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan penduduk, sehingga banyak pekerja mulai kembali ke perekonomian subsisten.²⁰ Mengenai aksi massa pada masa krisis tidak sebesar seperti pada masa kondisi perekonomian masih dalam taraf depresi. Dapat diperkirakan bahwa minimnya aksi massa tersebut disebabkan oleh tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pasca pemberontakan PKI tahun 1926.²¹

E. Kesimpulan

Memasuki abad XX, tingkat kesejahteraan penduduk pribumi di Yogyakarta semakin menurun. Perkembangan hasil produksi padi di Yogyakarta ternyata tidak sebanding dengan pertambahan penduduk. Kekurangan bahan pangan ini berdampak pada terjadinya berbagai wabah penyakit. Wabah penyakit influenza yang terjadi di Yogyakarta tahun 1919 merupakan terparah di Jawa dan Madura. Tidak hanya itu, wabah penyakit lain seperti malaria, kolera dan pes marak terjadi di Yogyakarta. Selain itu, kondisi di Yogyakarta tersebut diperparah dengan adanya birokrasi yang ketat. Melalui bermacam-macam pajak dan kerja wajib, maraknya persewaan bebas dengan tekanan elit desa serta beredarnya barang-barang impor menyebabkan penduduk pribumi di Yogyakarta mengalami kekurangan uang.

²⁰ Nathan Keyfitz dan Widjojo Nitisastro, *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1964), hlm. 70-71.

²¹ R. Reza Hudiyanto, "Pemerintah Kota dan Masyarakat Bumiputra Kota Malang 1914-1950", *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 321.

Kekurangan uang tersebut menyebabkan penduduk bekerja di perusahaan agroindustri. *Out*-migrasi di Yogyakarta selain untuk mencari pekerjaan juga untuk menghindari akumulasi tekanan yang terjadi di tempat tinggalnya. Mereka kemudian menuju ke Pasuruan yang banyak tersedia lapangan pekerjaan. Selain itu di Pasuruan memiliki tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat upah di Yogyakarta. Kemudian daya tarik lain di Pasuruan yaitu memiliki kondisi birokrasi yang tidak terlalu ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lahan-lahan perseorangan yang diakui serta jenis pajak dan kerja wajib yang sedikit. Faktor lainnya yaitu tersedia lahan-lahan pertanian yang luas terutama berada di daerah pedalaman.

Para migran dari Yogyakarta banyak terkonsentrasi di Malang dan Lumajang. Kemudian kebanyakan dari mereka berasal dari Kulon Progo. Migrasi ini mereka tempuh dengan menggunakan transportasi jenis kereta api. Mereka menggunakan Kediri sebagai tempat singgah sementara sebelum akhirnya menuju ke Pasuruan. Hubungan kerabat di daerah tujuan menyebabkan terjadinya pola migrasi berantai. Migrasi berantai menyebabkan para migran asal Yogyakarta berasal dari daerah asal yang sama dan juga menuju daerah tujuan yang sama. Mengenai asal-usul migrasi berantai ini tidak terlepas dari Untung Suropati, Perang Diponegoro dan perkebunan kopi, di mana banyak dari penduduk Yogyakarta, terutama Kulon Progo melakukan migrasi menuju ke Malang dan Lumajang.

Mengenai dampak *in*-migrasi di Malang dan Lumajang menyebabkan terjadi pertumbuhan penduduk yang besar. Pertumbuhan penduduk ini membawa dampak pada naiknya tingkat kepadatan penduduk. Meningkatnya tingkat kepadatan penduduk menyebabkan terjadinya perubahan wilayah administrasi, perkembangan wilayah dan banyak dibangunnya fasilitas umum.

Para migran yang datang ke Malang dan Lumajang membuka peluang bagi terjadinya intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan-lahan pertanian pangan, sehingga produksinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu *in*-migrasi ini menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial dan mobilitas sosial vertikal. Depresi ekonomi menyebabkan para pekerja agroindustri tersebut

melakukan pemogokan dan pembakaran lahan tebu. Memasuki masa krisis, mereka mulai kembali pada kehidupan subsisten di pedesaan.

Daftar Pustaka

Cetakan Resmi

Indisch Verslag 1931, Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indie Over Het Jaar 1930, Batavia: Departement van landbouw, Nijverheid en Handel, 1931.

Kolonial Verslag 1923 dan 1929.

Volkstelling 1930 Deel II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de Vorstlenlanden. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934.

Volkstelling 1930 Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934.

Volkstelling 1930 Deel VIII Overzicht voor Nederlands-Indie. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1936.

Buku

Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Burger, D. H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I*, terj. Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta: Pradnja Paramita, 1962.

Creutzberg, Pieter dan J. T. M. van Laanen, peny., *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, terj. Kustiniyati Mochtar, dkk., Jakarta: Obor, 1987.

Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang, 1830-1900*, Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1989.

Gooszen, Hans, *A Demographic History of The Indonesian Archipelago, 1880-1942*, Leiden: KITLV Press, 1999.

Kano, Hiroyoshi, *Pagelaran, Anatomi Sosial Ekonomi Pelapisan Masyarakat Tani di Sebuah Desa Jawa Timur*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Keyfitz, Nathan dan Widjojo Nitisastro, *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1964.

Scheltema, A. M. P. A., *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, terj. Anonim, Jakarta: Obor, 1985.

Sajogyo dan W. L. Collier, peny., *Budidaya Padi di Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900, Jilid 1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan, Studi Historis 1850-1942 di Jawa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Tesis dan Disertasi

Anton Haryono, "Industri Pribumi Daerah Yogyakarta Masa Kolonial, 1830-an-1930-an", *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.

Hudiyanto, R. Reza, "Pemerintah Kota dan Masyarakat Bumiputra Kota Malang, 1914-1950", *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.

Mudji Hartono, "Pertanian Tanaman Pangan di Karesidenan Rembang, 1900-1928", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002.

Yogyakarta, 23 November 2015

Pembimbing



Mudji Hartono, M.Hum.
NIP. 19550115 198403 1 001

Reviewer



H. Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum.
NIP. 19580121 198601 1 001